

DEMOKRASI DAN ANARKHI: KEBEBASAN YANG TERDISTORSI

Oleh; nurus shalihin djamra

nurus_djamra@yahoo.com

Abstrct: Democracy and Anarky: Distorted Freedom. to Samuel P.Huntington on the diviation of democracy that the military coup, electoral manipulation, coercion and repeated attacks against the opposition, jailing political opponents and the ban on political meetings are not compatible with democracy.huntington's thesis is true in Indonesia, this is caused Indonesia still learning as the foundation of political democracy,nation and state. No one if stout labels Indonesia as a nation of people who are crunching floating or extreme democracy "ersatz democraton", the term of democracy shy involving violence, blood and tears. This essay is essentially going to explain why democracy in Indonesia took the spirit of anarchy, tears and blood?

Abstrak: Demokrasi dan Anarkhi: Kebebasan yang Terdistorsi. Merujuk Samuel P. Huntington tentang penyimpangan demokrasi bahwa kudeta militer, pemilu yang dimanipulasi, koersi dan serangan berulang-ulang terhadap oposisi, pemenjaraan lawan-lawan politik dan larangan terhadap pertemuan-pertemuan politik adalah tidak sesuai dengan demokrasi (Huntington 1995). Tesis Huntington ini berlaku di Indonesia, hal ini disebabkan oleh karena Indonesia masih terus belajar demokrasi sebagai landasan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Tidak salah jika bayak orang melabelkan Indonesia sebagai bangsa yang sedang memamah demokrasi mengambang atau ekstrimnya "ersatz democraton", sebuah terma dari demokrasi malu-malu yang melibatkan kekerasan, darah, dan air mata. Esai ini pada intinya hendak menjawab mengapa di Indonesia demokrasi mengambil roh dari anarki, air mata dan darah?

Pendahuluan

Kilas balik sejarah demokrasi di Indonesia berawal dari semangat liberalisasi; pembebasan diri dari dominasi politik dan ekonomi. Semangat ini melahirkan gerakan sosial di dua level; elit dan akar rumput. Pada level elit, aktor intelektual dan mesin politik, pergolakan menuju demokrasi diarahkan pada piblikasi opini atau pernyataan pendapat sebagai gerakan "discourse" melawan wacana dominatif yang meneguhkan sistem otoritarianisme. Perdebatan ini telah dimulai pada awal bangsa ini dirumuskan. Hal ini terlihat dari pertarungan gagasan demokrasi liberal vs demokrasi kekeluargaan pada saat

sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menjelang Agustus 1945. Polemik gagasan demokrasi ini secara terus menerus diproduksi dalam sistem kehidupan bernegara, sehingga menjadi pangkal terjadinya berubah-ubah dan berfluktuasinya penerapan demokrasi di Indonesia. Faktanya, dalam bernegara, demokrasi terasa amat dekat dengan rakyat, namun, kadangkala demokrasi malah menjauhkan diri dari rakyat. Hal ini dapat ditelusuri dari sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi hadir dengan kepastian kekuasaan di tengah ketidakpastian stabilitas, bahkan demokrasi malah

cenderung menyebabkan realitas menjadi suatu yang paradoks.

Memahami demokrasi di Indonesia, agaknya mesti dirunut kembali pada sejarah penerapan demokrasi di dalam tubuh bangsa ini. Dalam sejarah bangsa Indonesia, dekade 1945 merupakan sebuah era di mana tonggak dan landasan bangsa dipancarkan. Pada era ini, Pancasila dan UUD 1945 diakui sebagai dasar ideologi bangsa. Di sebaliknya, era 1945-an sesungguhnya menjadi titik awal bagi penegakan demokrasi. Walaupun demokrasi baru sebatas hal yang normatif, namun di era ini polemik demokrasi terus diwacanakan. Hal ini didasarkan pada kenyataan sejarah bahwa dekade 1945 merupakan awal dikukuhkannya dasar filosofi berbangsa-bernegara Indonesia. Dari sini sebenarnya, penafsiran atas bentuk operasional negara selalu berlangsung, di mana "ijtihad" tentang demokrasi pun terus dilakukan. Tidak heran jika di Indonesia fluktuasi demokrasi senantiasa terjadi karena disebabkan oleh rekontekstualisasi dasar filosofi UUD 1945 (Baca; UUD 45) terhadap perubahan politik. Secara teoritis, penafsiran dan kontekstualisasi UUD 1945 penting dilakukan mengingat UUD 45 adalah konstitusi bangsa Indonesia. Sebab konstitusi adalah otobiografi bangsa yang harus ditulis ulang untuk menjaga transisi demokrasi ([www.unpan1.un.org /16/01/2009](http://www.unpan1.un.org/16/01/2009)). Ini bermakna, bahwa UUD 1945 tidak akan menjadi "sakti" ketika ia tidak mampu diterjemahkan secara luas terhadap kehidupan politik, ekonomi dan undang-undang bangsa Indonesia.

Menurut Eep Saifulloh Fattah (2000:16), pemikiran tentang demokrasi di Indonesia telah menjadi salah satu topik penting sejarah pemikiran politik. Para pendiri republik seperti Soekarno, Hatta, Soepomo dan

Natsir telah merumuskan pelbagai model demokrasi bagi praktik politik Indonesia. Soekarno dengan falsafah sinkretismenya, Hatta dengan model sosialis-demokrasi, Soepomo dengan faham integralistiknya dan Natsir dengan dasar-dasar ajaran Islamnya. Selain itu, berkembang pula pemikiran-pemikiran lain tentang demokrasi yang bervariasi selari dengan konteks sejarah yang digunaoleh para tokoh zaman. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia; *pertama*, Demokrasi Parlemen (1945-1957), *kedua*, Demokrasi Terpimpin (1957-1965), *ketiga*, Demokrasi Pancasila (1965-1998), dan *keempat*, Demokrasi Liberal (1998-sekarang). Inilah empat model dan fase perjalanan demokrasi secara umum di Indonesia.

Demokrasi Parlemen yang gagas Soekarno coba menerapkan demokrasi sebagaimana yang difahami Soekarno. Pada saat itu, tidak banyak orang memikirkan demokrasi karena *pertama*, keadaan pada masa itu membuat banyak orang lengah terhadap demokrasi, *kedua*, polemik ideologi yang berlaku membuat rakyat bimbang mesti memilih ideologi yang mana. Demokrasi Parlemen tidak lebih baik daripada sistem politik lainnya. Dalam zamannya, Demokrasi Parlemen lahir sebagai hegemoni Soekarno dalam menafsirkan UUD 1945 sesuai dengan selera feodalisme dan watak kepemimpinannya. Hal ini bermula semenjak dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X, 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi, utamanya Demokrasi Parlemen dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kuasa simbolik, sementara kekuasaan pemerintah yang riil dimiliki oleh Perdana Menteri, kabinet dan

Parlemen (Fattah, 2000:17). Siklus Demokrasi Parlemen hanya berjalan 12 tahun, namun dinamikanya sangat mengejutkan. Partai politik yang mewakili pelbagai ideologi, baik komunisme, nasionalisme, dan agama bersaing secara tajam, dan pergolakan politik pun tidak dapat dihindari. Upaya saling melakukan tarik menarik menjadi karakter demokrasi di fase ini sehingga menyebabkan penyempitan proses politik dan formulasi kebijakan hanya bermuara pada kelompok elit dan belum menyentuh rakyat sama sekali. Hal ini ditunjukkan oleh kajian J. Eliseo Rocamora (1991) bahwa pada masa 1945-1959 dengan pemusatan kuasa pada tangan-tangan elit-elit partai, rakyat hanya terasingkan dan terpinggirkan dari proses politik.

Keadaan lain yang muncul pada masa penerapan Demokrasi Terpimpin ialah semakin tajamnya persaingan dan perpecahan ideologi di antara partai politik. Menurut Rocamora (1991) elit-elit partai mengalami perpecahan karena dua sebab utama, yakni terhimpunnya rasa permusuhan selama ini telah menyebabkan runtuhnya bangunan toleransi dan meluasnya perasaan kecewa sehingga menguburkan harapan-harapan revolusi. Di bahagian lain, adanya kecenderungan partai untuk memperluas dukungan dengan memanfaatkan kesetiaan primodial seperti agama dan budaya dalam masyarakat Indonesia, dan pada saat yang sama pengaruh para pemimpin daerah terhadap partai-partai besar sehingga dukungan terhadap partai pun meluas pula menjadi bersifat kedaerahan dan golongan. Selain itu, salah satu penyebab mengapa Demokrasi Parlemen tidak berkesan dan gagal adalah karena tidak ada partai mayoritas di Parlemen. Empat partai, Partai Nasionalis Indonesia

(PNI), Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki jumlah korsi yang relatif sama (Sulistiyo, 2000:15). Dalam konteks ini soalnya adalah apa sebenarnya faktor di sebalik semua ini?

Sesungguhnya akar masalahnya terletak pada ketika demokrasi diarahkan pada kepentingan politik. Hal ini sejalan dengan tesis Huntington (1995) bahwa masalah-masalah serius mengenai ketidaktepatan muncul ketika demokrasi didefinisikan berdasarkan pada sumber wewenang atau tujuan. Dengan demikian, dapat diikhtisarkan bahwa intipati kehancuran Demokrasi Parlemen adalah, *pertama*, watak Soekarno yang tidak menyukai distribusi kekuasaan, *kedua*, penempatan dirinya sebagai presiden simbolik, *ketiga*, kuatnya tekanan ideologi pada pemerintah yang dipimpin Soekarno, dan *keempat*, kuat dan tajamnya persaingan dan perpecahan ideologi di antara partai politik.

Perpecahan dalam tubuh negara pada saat sistem Demokrasi Parlemen digunakan telah berimpak pada krisis integrasi yang parah, di mana gerakan "separatisme" kian menguat di pelbagai daerah. Keadaan ini mendorong Soekarno untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sehingga muncul konsep nasionalisasi politik dan nasionalisasi ekonomi (Fattah, 2000: 18), dan dari sinilah Demokrasi Terpimpin bermula. Menurut Hermawan Sulistiyo (2000:15) selama 9 tahun (1950-1959) sistem Demokrasi Parlemen digunakan, tidak satupun partai yang mampu memerintah cukup lama, hanya dua tahun partai yang mampu bertahan dalam sistem ini. Atas alasan tidak efektif dan gagal sistem Demokrasi Parlemen tersebut Soekarno yang

disokong tentara memutar haluan sistem Demokrasi Parlemen menjadi sistem Demokrasi Terpimpin. Berubahkah dan lebih baikkah keadaan bangsa di bawah Demokrasi Terpimpin?

Fase Demokrasi Terpimpin secara prematur telah dimulai dengan terbentuknya *Zaken Kabinet* pimpinan Ir. Juanda pada 9 April 1957, dan itu kemudian secara resmi dikukuhkan selepas Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peralihan Demokrasi Parlemen kepada Demokrasi Terpimpin diawali dengan berubahnya peta distribusi kekuasaan. Kekuasaan menjadi terpusat pada tangan Presiden dan secara signifikan diimbangi oleh peranan dan PKI dan Angkatan Darat. Di bawah Demokrasi Terpimpin, Indonesia berbelok ke arah komunis. Dalam membangun Demokrasi Terpimpin, Soekarno meletakkan “Nasakom”, kekuatan nasionalis, agama dan komunis menjadi pilar demokrasinya. Sudah dapat dipastikan alur pikiran Soekarno menjadikan Nasakom sebagai ideologi negara sebab realitas politik Indonesia saat itu selain didominasi oleh kekuatan nasionalis yang diwakili oleh PNI, agama (Masyumi dan NU) dan komunis (PKI), juga kekuatan politik tersebut telah mulai tumbuh dan berkembang jauh sebelum kemerdekaan. Di samping tiga pilar tersebut, ideologi Nasakom diyakini Soekarno menjadi kekuatan progresif revolusioner yang akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang disegani. Dalam kerangka ini dapat dipahami mengapa kemudian Soekarno menerjemahkan Nasakom secara luas sebagai sebuah kerangka bahwa Nasakom merupakan campuran dari ketiga sifat dan watak dasar yang harus menjadi keperibadian bangsa Indonesia (Sulistyo, 2000:16).

Atas dasar ini pulalah kemudian Soekarno memberi pencitraan Indonesia di dunia internasional sebagai sebuah kekuatan baru yang bukan berada di Blok Barat, Amerika dan Inggris, juga bukan di Blok Komunis, Uni Soviet dan RRC. Namun demikian, jika diselidiki lebih jauh peranan penyeimbang yang dimainkan Soekarno baik dalam bangsa Indonesia sendiri dengan menjadikan tiga pilar; Nasionalis, Agama dan Komunis, maupun di tingkat internasional tanpa memilih Blok Barat dan Blok Komunis merupakan inspirasi dari filosofi budaya Jawa. Dalam budaya Jawa, dua atau lebih kekuatan yang berseteru dibiarkan sehingga salah satu dari keduanya menemukan eksistensinya. Hal ini terlihat jelas bagaimana kemudian Soekarno di penghujung kekuasaannya tetap berada dan bermain-main dalam dua kekuatan, yaitu, tentara dan PKI. Peranan penyeimbang ini bukannya tanpa risiko bagi kelangsungan kekuasaan Soekarno bahkan dengan peranan ini pulalah kekuasaan Soekarno runtuh pada tahun 1966. Meskipun peranan Soekarno di level internasional secara kasat mata dapat dilihat sebagai upaya mencadangkan ideologi alternatif bagi ideologi dunia, namun dalam kenyataannya Soekarno kemudian terjebak pada Blok Kiri. Anehnya pilihan Soekarno bukan Uni Soviet sebagai pusat kekuatan ideologi komunis tetapi komunis RRC. Dalam konteks inilah dapat dilihat bagaimana Indonesia kemudian menganut faham dan berjuang habis-habisan melawan neokolonialisme dan imperialisme (Nekolim).

Dalam catatan Eep Saifulloh Fattah (2000:19) keadaan demokrasi pada era Demokrasi Terpimpin dicirikan oleh tingginya mobilisasi politik atas nama revolusi. Soekarno

menjadi tokoh sentral dalam lingkaran kekuasaan, sementara rakyat mengalami pengasingan dan dipinggirkan dari kekuasaan. Walaupun di atas permukaan terdapat keinginan besar dari rakyat untuk terlibat aktif dalam revolusi, namun kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara penuh oleh presiden. Dalam keadaan ini, PKI menggunakan pelbagai cara untuk membangun kekuatan politik secara besar-besaran dalam mencapai tujuan mereka, yakni menguasai sepenuhnya kekuasaan politik dan pemerintah.

Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin seolah-olah berada di atas angin dan terlenta terhadap kendali kekuasaan yang berada dalam genggamannya. Hal ini kian kentara tatkala Soekarno menasbihkan dirinya sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Setiap pidato Soekarno seolah-olah *sabda pandito raja* yang mesti dipatuhi dan diikuti. Sementara itu, ketimpangan politik yang semakin lebar membuat perasaan kecewa pelbagai golongan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Selain hal tersebut di atas, watak kepemimpinan Soekarno yang diktator serta sikap yang terlalu akomodatif terhadap PKI menyebabkan munculnya pelbagai gerakan subversif dalam masyarakat yang membuat pemerintahan Soekarno pada fase ini menjadi tidak stabil, dan akhirnya Demokrasi Terpimpin beserta kekuasaan rejim politik Soekarno tumbang.

Demokrasi Terpimpin akhirnya menjadi malapetaka politik bagi Soekarno, di mana pada tahun 1965-an tragedi subversif G30-S/PKI, sebuah tragedi kemanusiaan yang paling memilukan Indonesia sebagai sebuah bangsa, telah menghancurkan Soekarno. Melihat pada apa-apa yang

dilakukan oleh G 30-S/PKI, maka tidak mengherankan jika banyak orang mengatakan G30-S/PKI dengan sebuah aksi genosida; pembantaian massal. Kekerasan yang dilakukan PKI menimbulkan efek berantai yang menelan "anak kandungannya" sendiri, yaitu korban dari kalangan PKI itu sendiri. Di penghujung tahun 1965-an, aksi balasan yang dilakukan militer dan melibatkan tentara-tentara rakyat membantai anggota PKI. Kekerasan terhadap anggota dan orang yang bersimpati kepada PKI merupakan sebuah kecelakaan sejarah dalam demokrasi di Indonesia. Pada era 1965-an kebencian terhadap PKI disebarluaskan. Pemerintah yang dikomandoi Mayor Jenderal Soeharto memobilisasi TNI, dan media massa dipaksa melakukan pencitraan yang keji terhadap PKI. Dalam hal ini, Stanley (www.geocities.com/edicahy, 19/8/2008) menyatakan bahwa kampanye atas kekejaman itu bukan saja dibuat atas dasar kebohongan dan cerita rekaan semata, tetapi memang sengaja dirancang untuk menimbulkan kemarahan masyarakat terhadap golongan komunis, sekaligus menyiapkan panggung pembunuhan besar-besaran dengan alasan dendam rakyat terhadap mereka.

Menelaah keadaan politik sepanjang 1945-1965 ada beberapa catatan penting yang dapat dibentangkan. *Pertama*, stabilitas pemerintahan dalam waktu 20 tahun berada dalam keadaan yang amat kacau dan teruk. Dalam catatan Pinch dan Lev sebagaimana dinukilkan Eep Saifulloh Fattah (2000) sepanjang 1945-1965 sistem politik Indonesia mengalami dua puluh lima pergantian kabinet, dan tidak ada satupun kabinet yang dapat bertahan dalam waktu dua tahun penuh. Gambaran yang sama diungkapkan Hudson dan Taylor (Sanit

1990:1), di mana sepanjang 1948-1967 telah terjadi dua puluh lima pergantian kekuasaan eksekutif di Indonesia dengan rata-rata satu kali pergantian setiap tahun. *Kedua*, stabilitas politik secara umum juga kacau karena berlakunya konflik politik dalam jumlah yang amat tinggi. Catatan Hudson dan Taylor (Nasikun, 1984:85-86) memperlihatkan bahwa sepanjang 1948-1967 telah berlaku 45 demonstrasi dan protes, 82 kerusuhan 7.900 serangan bersenjata dan 615.000 orang terbunuh karena sebab kekerasan politik. *Ketiga*, krisis ekonomi adalah suatu keadaan lain yang menjadi ciri period 1945-1965. Dalam masa revolusi dan Demokrasi Parlemen, pergantian kekuasaan yang terus menerus menyebabkan setiap kabinet tidak sempat merealisasikan program ekonomi dan sosial mereka. Obsesi yang berlebihan terhadap revolusi, perhatian yang berlebihan terhadap masalah internasional, salah urus dan pengelolaan politik yang tidak baik menyebabkan bangsa Indonesia di bawah kendali Demokrasi Terpimpin jatuh pada krisis ekonomi yang parah. *Keempat*, pada saat yang sama perangkat kelembagaan politik berada dalam keadaan memprihatinkan pula. Birokrasi dan elemen pemerintah lainnya berada dalam keadaan yang tidak terurus dengan baik. Akibatnya, proses politik dan pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan para pegawai pemerintahan (Fattah, 2000:20).

Berakhirnya Demokrasi Terpimpin dengan jatuhnya kekuasaan Soekarno, maka kekuasaan dan demokrasi beralih haluan dari Soekarno dengan Demokrasi Terpimpin kepada Soeharto dengan Demokrasi Pancasila. Upaya pertama Soeharto sebagai penguasa Orde Baru melakukan

konsolidasi ideologi Pancasila. Soeharto dalam era ini berupaya menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945. Atas alasan ini, Soeharto tidak gentar untuk menumpas lawan politiknya yang berideologi non-Pancasila seperti PKI. Tidak salah jika banyak ahli mengistilahkan fase Orde Baru dengan fase Demokrasi Pancasila. Salah satu ciri paling tampak adalah setiap kebijakan politik senantiasa atas nama Pancasila. Lantas selepas mengasaskan Pancasila dan UUD 1945 bebaskan demokrasi dari ritual kekerasan?

Pada masa awal kepemimpinannya, Soeharto tidak hanya berhadapan dengan kekuatan PKI sebagai musuh besar Orde Baru. Pada sisi yang lain, Soeharto juga menghadapi konflik antara pemimpin-pemimpin moderen yang berpikir pragmatis dengan pemimpin tradisional seperti politis dari kelompok partai-partai Islam yang lebih mengedepankan pertimbangan yang irrasional (Hiariej, 2005:2). Atas dasar ini pulalah, Soeharto kemudian menerapkan “*asas tunggal*”, di mana Pancasila dijadikan sebagai ideologi semua partai politik. Politik uniformasi dengan menggunakan Pancasila sebagai ideologi politik partai merupakan strategi Soeharto untuk dapat mengendalikan dan mengawal secara total kehidupan bangsa dan negara, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, ataupun dalam aspek birokrasi pemerintahan pusat, daerah dan lokal. Selain hal tersebut di atas, alasan mengapa Soeharto menerapkan politik uniformasi adalah karena Soeharto beranggapan bahwa yang diperlukan Indonesia adalah menanamkan kembali integritas dan stabilitas sebagai sebuah bangsa dengan *ber-bhineka tunggal ika*. Persatuan dan kesatuan harus dirasakan

sebagai keperluan mutlak kerana bangsa Indonesia dibentuk oleh persamaan sejarah, nasib dan tujuan (Fattah, 2000:69). Hal ini dilatarbelakangi oleh kecurigaan dan ketakutan Soeharto atas gerakan subversif serta separatisme yang berpotensi muncul dan menguat di daerah sebabagaimana yang terjadi pada masa Orde Lama Soekarno. Hal ini terlihat jelas dalam pidato kenegaraannya yang pertama pada tahun 1967, di mana Soeharto menyatakan bahwa pemerintah memberi perhatian besar secara khusus mencegah “pengorabanan yang tidak perlu” yang pernah dilakukan dalam sejarah Indonesia merdeka. Oleh karena itu semua potensi yang akan mengancam terhadap negara mesti dicegah (Fattah, 2000:69).

Soeharto dalam kepemimpinannya sangat militeristik, serba dikawal dan serba dibatasi. Model demokrasi Soeharto tersebut melahirkan pelbagai konflik dan kekerasan, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah dan lokal seperti kasus gerakan separatisme di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Maluku Selatan, Papua dan Timor-Timur. Dalam peristiwa yang lain, jika rata-rata usia orang Indonesia berumur 30 tahun, tentu masih terbayang dengan jelas bagaimana kekerasan; kerusuhan, penculikan dan pembunuhan terbentang dalam sejarah Demokrasi Pancasila di Indonesia. Peristiwa Malari, Tanjung Priok pada 1970-an misalnya sedikit contoh dari kerusuhan dalam siklus Demokrasi Pancasila yang melibatkan kekerasan militer. Sekitar 14 tahun silam, 27 Juli 1996 menjadi sisi gelap dari praktik demokrasi di Indonesia. Di bawah pemerintahan rejim politik Orde Baru pada Sabtu pagi berlaku perkelahian berdarah di kantor Partai Demokrasi

Indonesia (PDI) Jakarta yang dramatis di hadapan aparat keamanan.

Soeharto dipenghujung kekusaannya juga mengalami nasib yang sama seperti Soekarno. Demokrasi Pancasila yang dikehendaki Soeharto agar mampu mengawasi dan mengawal negara ternyata berdampak pada munculnya pelbagai tindakan kekerasan. Konflik sosial, anarki dan kekerasan kemudian menjadi kekuatan pendorong terjadinya perubahan rejim politik Orde Baru kepada Orde Reformasi. Hampir sama dengan perubahan rejim politik Orde Lama kepada Orde Baru, di mana unsur kekerasan terlibat di dalamnya. Bedanya, kekerasan pada perubahan rejim politik Orde Baru kepada Orde Reformasi lebih kentara konflik kelas seperti konflik antara kelas menengah dengan masyarakat kecil.

Kamis 21 Mei 1998 merupakan awal peralihan rejim politik Orde Baru kepada Orde Reformasi. Sebuah fajar baru, di mana Indonesia sedang menuju era demokrasi yang lebih baik dan egaliter. Secara bertahap B.J Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono coba membawa dan mengembalikan demokrasi Indonesia sesuai dengan amanat reformasi. Oleh karena kebebasan menjadi “keyword” pada era ini, maka banyak orang mengistilahkan era ini dengan “kuasi demokrasi liberal”. Apakah kebebasan ini mampu membuat demokrasi di Indonesia lebih jinak dan tidak berwajah keras?

Ciri utama demokrasi selepas reformasi adalah menempatkan kebebasan individual dalam pembentukan struktur politik. Demokrasi Liberal yang berlaku selepas runtuhnya rejim politik Orde Baru telah membuka pelbagai perbaikan melalui demokrasi politik,

sebuah demokrasi yang memberi tumpuan pada penyusunan ulang sistem politik, baik dalam aspek pemilu maupun dasar norma sistem politik. Efek daripada demokrasi liberal yang membolehkan setiap individu menyatakan hak dan kehendak politiknya secara bebas, telah membawa substansi politik dan demokrasi menjadi terabaikan, karena politik dan demokrasi lebih dipahami sebagai kehendak untuk menyatakan kebebasan dan berebut kekuasaan. Dalam konteks inilah, konflik, anarki dan kekerasan kembali menempati ruang sosialnya di tengah berlangsungnya proses politik dan demokrasi. Walaupun banyak pemerhati mengatakan bahwa konflik, anarki dan kekerasan pasca reformasi bukanlah bahagian dari demokrasi karena tidak ada peristiwa kekerasan yang meletus di tempat-tempat pemungutan suara seperti yang diungkapkan Indra Jaya Piliang (www.freedom-institute.org, 1/1/

2009). Namun, benarkah demikian adanya?

Dekade 2006-2008-an, konflik Pilkada yang dipicu oleh kalah-menangnya calon Gubernur seperti yang terjadi di Maluku Utara tahun 2008 adalah fakta yang menyangkal bahwa kekerasan bukanlah bahagian dari demokrasi. Jika demokrasi liberal memerlukan kebebasan politik, maka anarkisme masyarakat akibat kalahnya satu calon menjadi penanda bahwa demokrasi liberal di Indonesia masih menyimpan kekerasan. Dalam bentuk ini tidak mengherankan jika demokrasi liberal di Indonesia terjebak ke dalam anarki dan "mobokrasi", yaitu, pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak tahu seluk-beluk pemerintahan. Pasca Orde Baru, politik tidak lagi tunggal dan seragam, namun mobilisasi kekuatan uang, kekuasaan dan penggunaan unsur-unsur kekerasan masih menjadi ciri utama pemilu di Indonesia.





Gambar: Kerusuhan Pemilu di Maluku Utara 2008 dan Pemilu di Tana Toraja Makasar Sulawesi Tahun 2010

Sumber: ngodod.wordpress.com/page/7/ dan pesatnews.com/2010/06/25/berita-encekam/



Gambar: Kerusuhan Pilkada di Mojokerto Tahun 2010

Sumber: vivanews.com/news/read/152 & www.dakdem.com/galeri/23-foto/25...

Ketika uang menjadi kekuatan politik untuk memobilisasi pemilih, termasuk cara-cara represif oleh militer seperti di Aceh dan Papua masih berlaku, maka apakah dapat dikatakan bahwa demokrasi sudah menjadi sistem politik yang normal? atau hal ini luput dari pengamatan karena halusnya cara orang Indonesia bermain politik (Mahdi www.people.cornell.edu, 1/1 2009). Tidak dapat ditampik bahwa kekuatan demokrasi liberal di

Indonesia telah mendorong banyak hal untuk dipolitisasikan termasuk agama dan etnik. Dalam bentuk inilah kemudian politik identitas semakin menguat di Indonesia seiring dimobilisasinya agama dan etnik ke dalam politik seperti apa yang terjadi di Poso Sulawesi Tengah (Kristen-Muslim 1998-2001), Ambon dan Maluku Selatan (Kristen-Muslim 1999-2002), Kalimantan Barat (Melayu-Madura 1999-2001), Maluku Utara

(Kristen-Muslim 1999-2001), Kalimantan Tengah (Dayak-Madura 2001).

Memang pilihan terhadap demokrasi sebagai sebuah sistem politik agaknya sudah merupakan kemestian dalam politik moderen, apalagi setelah muncul secara meluas gelombang demokratisasi di dunia sedang berkembang (Huntington, 1991). Hanya saja demokrasi seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Satu sisi memilih demokrasi sebagai sistem politik adalah pilihan yang tepat dalam mengatasi pelbagai krisis kemanusiaan yang lahir dari rahim otoritarianisme, totalitarianisme, dan depotisme. Sisi lain dari wajah humanismenya, demokrasi pun tidak jarang terseret pada *mobokrasi*, anarki dan tirani. Atas nama demokrasi misalnya pembunuhan dan pembantai diabsahkan seperti apa yang berlaku di Afganistan, Iraq, termasuk Indonesia.

Dalam konteks ini bahwa demokrasi selain bukanlah satu-satunya yang menjamin kehidupan kemanusiaan. Demokrasi pun juga membawa risiko tersendiri seperti kritikan Plato dan Aristoteles (Sorensen, 1993:4). Plato misalnya mengkritik demokrasi berhubungan dengan pemerintahan yang didominasi oleh mayoritas kaum miskin. Rakyat dapat melakukan apa pun yang mereka inginkan dan tidak ada penghormatan terhadap otoritas dalam keluarga, sekolah, atau tempat lainnya. Plato menyimpulkan bahwa demokrasi akan menyebabkan hukum tidak akan dihormati karena hal itu merupakan serangan terhadap kebebasan rakyat. Kondisi ini menurut Plato akan menimbulkan anarki, dan dengan tidak adanya otoritas politik akan menimbulkan kekacauan serta memberi

ruang timbulnya tirani. Machiavelli (Rapar, 1991:35) juga mengingatkan bahwa monarkhi mudah menjadi tirani, aristokrasi mudah menjadi oligarki dan demokrasi mudah berubah menjadi anarki.

Melintasi fenomena kekerasan dalam demokrasi, memastikan logika berfikir mengapa kekerasan senantiasa melekat dalam demokrasi di Indonesia; apakah benar bahwa proses demokrasi memiliki unsur-unsur kekerasan untuk mendorong perubahan rejim politik? Jika tidak, kenapa setiap terjadinya perubahan rejim politik kekerasan senantiasa menjadi model dan pilihan bangsa di Indonesia? Jack Snyder (2000:44-46) melihat akar permasalahan dari konflik dan kekerasan dalam demokrasi di dunia sedang berkembang adalah hasutan dan propoganda dari kelompok elit nasionalis. Menurut Snyder, semua elit nasionalis berkepentingan untuk menguatkan gagasan dengan cara membesar-besarkan ancaman dari bangsa atau kelompok lain dan sekaligus melebih-lebihkan keuntungan jika bersatu menghadapi ancaman. Dalam kasus Indonesia, ancaman bagi elit nasionalisme bukan datang dari luar, melainkan ancaman itu datang dari dalam bangsa Indonesia itu sendiri seperti dari golongan Nasionalisme, SARA dan Etnonasionalisme. Dalam bentuk ini, perang jargon seperti yang berlaku tahun 1965 telah mendorong terjadinya kekerasan sosial terhadap kelompok lain.

Mengikuti logika yang dibangun Snyder bahwa konflik kian hebat berlaku dalam negara yang sedang membangun demokrasi disebabkan oleh persaingan antara kelompok dan propaganda elit. Snyder (2000:22) lebih lanjut menjelaskan bahwa demokrasi dan konflik nasionalis bermula dari fakta bahwa

nasionalisme sebagai sikap yang lazim di kalangan rakyat jauh sebelum berlakunya proses demokratisasi. Jika rakyat yang berbeda budaya benar-benar menginginkan adanya negara masing-masing, dan jika mereka menghuni kawasan yang sama, maka melaksanakan pemilu oleh mereka sama saja dengan mengadu domba mereka karena pada dasarnya tujuan yang saling bertentangan ini dapat menyebabkan konflik. Di Indonesia, dalam sejarahnya persaingan antara kelompok rakyat, pertarungan antara elit dipadamkan oleh emperium dan rejim otoritarian, dan sejarah Orde Baru adalah faktanya. Sementara di sisi yang lain, proses demokrasi menjadi alat untuk keinginan nasionalis untuk menggantikan penguasa atau melanggengkan kekuasaan. Dalam konteks ini, demokrasi cenderung menghasilkan tirani mayoritas atau pertarungan hidup mati antara kelompok SARA yang sama-sama menghendaki negara untuk kelompok sendiri. Di Indonesia, inilah fakta empirik mengapa demokrasi senatiada berhubungan dengan konflik berdarah.

Dalam konteks ini, demokrasi menjadi hal yang paradok. Jika pada mulanya demokrasi menciptakan turbulensi vertikal, di mana kekerasan menjadi alat bagi rakyat untuk meruntuhkan rejim politik diktator, maka selepas rejim tersebut tidak lagi berkuasa, demokrasi pun menciptakan turbulensi horizontal, yakni terbukanya ruang sosial berkembangnya kekerasan antara masyarakat. Dalam konteks ini menarik menyimak sindiran Hobbes, biarkan orang-orang memaki jamannya, merekalah yang akan membangun *Leviathan* (Schmandt 2009:301). Ini bermakna rakyat yang sadar bahwa mereka memiliki hak untuk bebas, hak diperlakukan sama di hadapan hukum serta hak politik, maka

otomatis rakyat pun akan berjuang untuk meneguhkan identitas mereka.

Demokrasi menuntut tersedianya “ruang publik” *a free public sphere* bagi rakyat dalam menyatakan diri, rejim dan hak politik mereka. Namun demikian dilemanya adalah “ruang publik” yang ditawarkan demokrasi terdiri daripada heterogen kepentingan, kecenderungan dan pelbagai variasi identitas. Disebabkan identitas adalah simbol diri, dan demokrasi memerlukan legitimasi, maka demokrasi sering menyebabkan munculnya sikap primordialisme antara satu kelompok seperti etnik, agama dan ras terhadap kelompok lainnya. Keadaan ini yang dialami Indonesia pasca reformasi, di mana konflik dan kekerasan horizontal tumbuh berkembang meluas ke pelbagai wilayah yang tidak mampu dikontrol seperti yang berlaku di Poso, Ambon, Maluku Selatan, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Konflik horizontal tersebut bukan hanya disebabkan faktor ekonomi saja, tetapi juga melibatkan jejaring primordial yang amat kompleks seperti agama, etnik dan ras.

Pasca reformasi pintu demokrasi terbuka lebar. Kebebasan yang semula ditekan, kini dengan mudah diperoleh semua orang tanpa batas di mana pun dan oleh siapa pun. Hal ini setidaknya dapat diperhatikan dari munculnya identitas primordial ke pelbagai aspek, termasuk politik. Yudi Latif (2007:1) menggambarkan kemunculan Orde Reformasi membawa *landmark* baru dalam dunia politik Indonesia, salah satunya “penghijauan” elit politik. Ini bermakna, ada semangat yang muncul manakala reformasi tumbuh, yakni semangat untuk menyatakan hak politik dan identitas primordial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, tidak

heran jika kemudian pelbagai partai politik yang mengandalkan ikatan keagamaan lahir dan ikut bertarung dalam dunia politik di Indonesia.

Keinginan bebas untuk meneguhkan diri dan identitas di seluruh pelosok negeri bukan tidak menumbulkan dilema, lebih daripada itu juga telah melahirkan persoalan yang amat kompleks. Betapa tidak, daerah yang dahulunya merasa begitu tenang dalam ikatan kebangsaan tiba-tiba berganti dengan identitas kedaerahan. Isu-isu “putra daerah” menguat, sekaligus menghambat orang lain yang tidak berasal dari daerah tersebut untuk ikut menikmati penghidupan, baik pada birokrasi maupun pada jabatan struktural. Setidaknya hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa proses utama yang dilahirkan oleh demokrasi pasca reformasi memberi dampak negatif terhadap komitmen kebangsaan. Konflik dan kekerasan sosial di Poso, Ambon, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah adalah sederatan contoh betapa mahal biaya yang mesti dibayar oleh demokrasi.

Perjalanan menuju demokrasi di Indonesia memang berat dan berbahaya karena selama ini ada dilema dalam sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, yakni tarik menariknya antara sistem demokrasi liberal, sebuah konsep pemerintahan yang dihasilkan melalui perkembangan dan kepentingan masyarakat Barat dengan demokrasi yang lahir rahim perkembangan nilai-nilai dan kearifan budaya. Hal ini terlihat manakala bangsa Indonesia mesti memilih antara konsep pemerintahan rakyat, pemerintahan demokrasi atau pemerintahan otonomi selepas Indonesia merdeka (Djamra 2003). Micheal Mann (2005:70)

mengingatkan bahwa ada bahaya yang mengitari demokrasi di abad ke-19, apalagi apabila dalam satu negara terdapat dua konsepsi demokrasi yang dijalankan, yakni organik dan liberal karena kedua-duanya akan cenderung berdampingan.

Dalam kerangka ini dapat dipahami mengapa konflik begitu meluas berlaku pasca reformasi. Semula konflik bersifat vertikal antara rakyat di satu sisi dan negara di sisi lainnya, namun selepas reformasi konflik sudah berubah bentuk menjadi konflik horizontal antara sesama masyarakat. Ada pelbagai motif dan faktor yang mendorong konflik itu berlaku, mulai dari masalah ekonomi, politik sehingga agama dan etnik ikut terlibat menjadi pemicu. Ini barangkali risiko dari negeri yang beragam budaya, etnik dan agama sehingga begitu sensitif dan tidak stabil manakala melewati transisi politik. Sehubungan dengan ini, Mann (2005:491) menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia tampaknya lebih berat berbanding demokrasi di India karena demokrasi di Indonesia telah mendorong pelbagai *shock* di dalam struktur sosial, politik dan budaya. Menurut Mann hal ini disebabkan karena di Indonesia, proses demokrasi dihadapkan pada, *pertama*, kekuatan imperialisme yang melibatkan *a quasi-colonial* dalam membuat kebijakan publik di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rekayasa kebijakan transmigrasi lebih dari 10 juta orang dari pulau Jawa ke kawasan lain yang berada jauh dari pusat negara seperti transmigrasi etnik Madura ke Kalimantan. Di sebalik semua ini, mereka yang ditransmigrasikan adalah mangsa eksploitasi dari “intensif ekonomi” yang diupah secara tidak layak. Pemerintah Orde Baru membujuk

rakyat bertransmigrasi dengan tujuan “demi pembangunan, modernisasi dan berpartisipasi dalam globalisasi. Namun seutuhnya kebijakan ini adalah dampak dari imperialisme yang mencengkam rakyat kecil yang tidak mempunyai modal.

Kedua, lemahnya institusi negara. Kaum nasionalis membangun persekongkolan dengan kaum intelegnsia sekuler dan militer yang diperkuat dengan bergabungnya organisasi Muslim yang tidak begitu suka terhadap negara Islam oleh golongan politik radikal. Namun anehnya, tidak ada golongan militer atau pun kelompok Muslim mayoritas mampu melakukan komitmen pada demokrasi dan negara sekuler. *Ketiga*, Indonesia bukanlah negeri yang mampu mengontrol kapitalisme. Faktanya, 70% ekonomi dikuasai oleh etnik China, padahal mereka hanya 4% dari populasi yang ada di Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya kemarahan politik dan meledak dalam kebencian terhadap etnik. Kasus penyerangan terhadap warga China pada saat reformasi tahun 1998 adalah dampak paling nyata atas hal ini. *Keempat*, Indonesia telah menjadi saksi menyebarnya imperialisme ke luar dari pusat menuju daerah seperti Papua, Maluku dan Sulawesi. Konflik yang berlaku di Papua, Maluku dan Sulawesi sebahagiannya dipicu oleh ketidakseimbangan ekonomi yang disebabkan imperialisme. Sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh elit, sementara rakyat kecil tidak mendapatkan dampak positifnya. Dalam keadaan ini kemudian identitas seperti agama, suku, ras dan kampung terbentuk dan diletupkan pada golongan yang dianggap sebagai representasi imperialisme.

Tesis Takis Fotopoulos (2009:150-158) tentang penyebab

krisis meskipun tidak ditujukan menganalisis kekerasan, dapat berguna untuk mengetahui mengapa kekerasan horizontal begitu meluas pasca reformasi. Menurut Takis gairah massa yang menyebabkan skala krisis meluas didorong oleh pelbagai krisis yang berlaku menjelang terbentuknya struktur ke arah demokrasi yang melibatkan pelbagai dimensi seperti ekonomi dan politik. Permasalahan ini muncul manakala kekuatan dan kekuasaan terpusat pada ekonomi. Perkembangan ekonomi sangat menentukan derjat krisis pada dimensi ekonomi. Di Indonesia krisis ekonomi senatiasa muncul memulai ketegangan dan kontradiksi dalam masyarakat seperti yang berlaku menjelang runtuhnya rejim politik Orde Baru. Pada masa yang sama menguatnya kekuasaan politik adalah hasil utama dari perselingkuhan politik dengan kekuatan ekonomi. Kombinasi dinamika ekonomi pasar dengan demokrasi telah mendorong lahirnya kemahiran politik yang melibatkan *think-tank* politik. Dalam keadaan ini politik bagi politisi tidak lebih setakat persoalan “solek-mensolek” atau pencitraan, sedangkan di pihak rakyat muncul sikap tidak peduli terhadap politik itu sendiri.

Puncak terakhir dari krisis adalah rapuhnya struktur sosial. Takis dengan menggunakan pendekatan “determinisme ekonomi” melihat bahwa masalah ekonomi telah membentuk realitas demokrasi atau pun kerapuhan demokrasi. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi yang membesar hanya pada satu golongan atau “konglomerasi ekonomi” telah membangun kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas elit ekonomi biasa ditunjukkan dengan kuatnya budaya konsumerisme dan individualisme yang mengasingkan mereka dari struktur

sosial lainnya. Kedengian pun bermunculan akibat ketidakseimbangan ekonomi karena penguasaan sumber daya ekonomi hanya dimiliki sedikit orang saja. Kondisi ini mendorong rakyat memecah diri berdasarkan ikatan-ikatan primordial seperti suku, agama dan ras dengan garis pemisah antara “penguasaan ekonomi” dengan “non-penguasaan ekonomi”. Dalam keadaan tertentu masyarakat yang terpecah dengan mudah berkonflik, merebutkan sumber-sumber ekonomi yang tersebar di dalam struktur politik seperti berebut kekuasaan dan di dalam struktur material ekonomi seperti hutan dan tanah.

Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa selalu saja ada cabaran yang membuat proses mencapai demokrasi tidak berjalan baik. Apakah sudah menjadi takdir demokrasi atau hanyalah sebuah keadaan yang lahir dari struktur yang memang telah buruk? Joseph A. Scumpeter (2003:250) mencatat bahwa metode demokrasi merupakan penataan institusional dalam kebijakan politik untuk merealisasikan kebaikan rakyat, karena dalam doktrin klasik demokrasi dapat dicapai dengan kedaulatan *will* banyak orang. Ini bermakna, manakala kotak pandora demokrasi dibuka lebar, maka saat itu ada kecenderungan keinginan dan pelbagai kepentingan individu saling bertentangan satu dengan lainnya sebab satu kelompok akan menemukan keinginan terkuat untuk mengungkapkan identitas diri dan memenangkan kepentingan kelompok di atas kelompok lainnya. Dalam situasi ini kebebasan tidak dapat dikendalikan oleh negara, walaupun demokrasi ditubuhkan atas kebebasan dan kedaulatan manusia, karena demokrasi sendiri pun bukanlah sesuatu yang berpengaruh mengontrol kebebasan pada saat demokrasi mulai

tumbuh. Negatifnya, apabila demokrasi liberal menguat, tidak hanya superioritas kelompok yang turut menguat, tetapi juga paradigma primordialitas seperti agama, suku dan ras cenderung dijadikan logika kehidupan. Apabila keadaannya sudah demikian, maka persaingan dan konflik antara kelompok agama, etnik dan ras untuk merebut sumber kekuatan politik dan ekonomi menjadi tidak dapat dihindarkan.

Penjelasan ini setidaknya dapat menjadi salah satu perspektif bagaimana demokrasi terutamanya pasca reformasi dapat rapuh dengan hadirnya kontradiksi dalam kehidupan ekonomi, politik dan sosial-budaya yang mengakibatkan konflik dan kekerasan sosial seperti yang berlaku di Poso, Ambo, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan daerah lainnya. Walaupun tidak satu pun politik kebangsaan berjalan semudah membincangkan di pelbagai seminar sebagaimana yang diungkapkan Dworkin (2006:127), namun demokrasi paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial (Budiardjo, 2008:105) karena demokrasi memberikan harapan yang tinggi untuk menuntun jutaan manusia. Meskipun tanpa sistem ekonomi yang ideal, setidaknya demokrasi mampu mendorong seluruh kompetensi ini muncul secara perlahan. Kualitas harapan yang dilahirkan oleh demokrasi memang cukup menarik banyak manusia memujanya, akan tetapi untuk mencapai proses tersebut demokrasi hadir dengan dua wajah, yakni “wajah lunak” tanpa kekerasan dan “wajah keras” Lantas bilakah kedua hal ini terjadi dalam satu negara, seperti Indonesia?

Merujuk Ukraina apabila demokrasi muncul dari bawah (*battom up*) dan mampu mendorong demokrasi

sebagai sebuah model institusional dan *legal arrangement* (Alexander Bogomolov & Alexander Lytvynenko, 2009:77), namun untuk kasus Indonesia lebih kompleks lagi. Memang secara historis, demokrasi pernah juga muncul dari bawah (*battom up*), perubahan rejim politik Orde Baru kepada Orde Reformasi salah satu contohnya. Gerakan massa turun ke jalan yang menuntut demokrasi merupakan kehendak yang lahir dari bawah, hanya saja pasca reformasi kehendak bersama tersebut mulai terpecah. Kekutan rakyat yang semula bersatu padu melawan kehendak rejim politik berkuasa seketika berubah menjadi geseran kepentingan. Apa yang berlaku kemudian adalah demokrasi pun berubah wujudnya sebagai mekanisme pembentuk perpecahan sosial dan mendorong munculnya pelbagai kontradiksi di dalam masyarakat. (ns)

Daftar Bacaan

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.*, Jakarta: Gramedia, Budiman, Arief, 2002, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Gramedia, Jakarta.
- Bogomolov, Alexander & Lytvynenko, Alexander. 2009. *The Orange Revolution*. Dlm. Emerson, Micheal & Youngs, Richard (pnyt). *Democracy Plight in the European Neighbourhood: Struggling Transitions and Proliferating Dysnaties*, hlm.77-90. Brussels: Centre for European Policy Studies.
- Dworkin, Ronald. 2006. *Is Democracy Possible Here?: Principle For A New Political Debate*. New Jersey: Princenton University Press
- Djamra, Nursh Shalihin. 2003. *Demokrasi Lokal di Bawah Bayang-Bayang Negara: Studi Atas Dominasi dan Hegemoni Negara Terhadap Nagari di Minangkabau*. Tesis Master. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Fattah, Eep Saifulloh. 2000. *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*. Bandung: Rosda.Hiariej, Eric. 2005. *Materialisme Sejarah Kejatuhan Soeharto; Pertumbuhan dan Kebangkrutan Kapitalisme Orde Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Fotopoulos, Takis. 2009. *The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy. The International Journal of*

- Inclusive Democracy* 3(2): 150-158.
- Huntington, Samuel P. 1991. *The Third Wave; Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press.
- Latif, Yudi. 2007. *Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Mahdi, Saiful. 2009. Naifnya Demokrasi Kita. <http://www.people.cornell.edu/pages/sm364/Naifnya%20Demokrasi%20Kita.pdf> [1 Januari 2009].
- Mann, Micheal. 2005. *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasikun, 1984. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Piliang, Indra Jaya. 2009. Konflik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Transkrip diskusi Freedom Institute. http://www.freedom-institute.org/pdf/konflik_dan_masa_depan_demokrasi.pdf [1 Januari 2009]
- Rapar, J.H. 1991. *Filsafat Politik Machiavelli*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rocamora, J. Eliseo. 1991. *Nasionalisme Mencari Ideologi; Bangkit dan Runtuhnya PNI 1946-1965*. Jakarta: Grafiti Press.
- Schmandt, Henry J. 2009. *A history of Political Philosophy*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism & Democracy*. New York: Routledge.
- Sim, Stuart. 2000. *Derida and the End History*. New York: Icon Books UK.
- Snyder, Jack. 2000. *From Voting To Violence; Democratization And Nationalist Conflict*. New York: London W.W. Norton & Company.
- Sorensen, Georg. 1993. *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. , United States of America: Westview Press.
- Sulistyo, Hermawan. 2000. *Palu Arit di Ladang Tebu; Sejarah Pembantaian Massal Yang Terlupakan, Jombang-Kediri 1965-1966*. Jakarta: Gramedia.
- Stanley. 2008. Penggambaran Gerwani Sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan; Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka. <http://www.geocities.com/edicaHy>, [19/8/2008]
- www.unpan1.un.org
www.people.cornell.edu,